LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten. Kinerja Dinas diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan

civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Basung, Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN AGAM

ROSVA DESWIRA, S.Pi. M.Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19721209 200604 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator kinerja sasaran menunjukan selain keberhasilan juga memiliki kekurangan sebagai tantangan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023, ditetapkan 6 sasaran kinerja dengan 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 3 indikator yang

berhasil mencapai target dan 3 indikator yang belum mencapai target sasaran. Seiring dengan tuntutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, upaya perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam akan terus dimaksimalkan di waktu mendatang melalui koordinasi dan kerjasama yang baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Struktur Organisasi 1
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah 4
1.4 Landasan Hukum 5
1.5 Sistematika 6
BAB II 7
PERENCANAAN KINERJA 7
2.1 Rencana Strategis 7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 13
BAB III 17
AKUNTABILITAS KINERJA 17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 19
BAB IV 37
PENUTUP 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam terdiri atas :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
d. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
f. Bidang Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap
g. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber daya Perikanan
h. UPTD

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

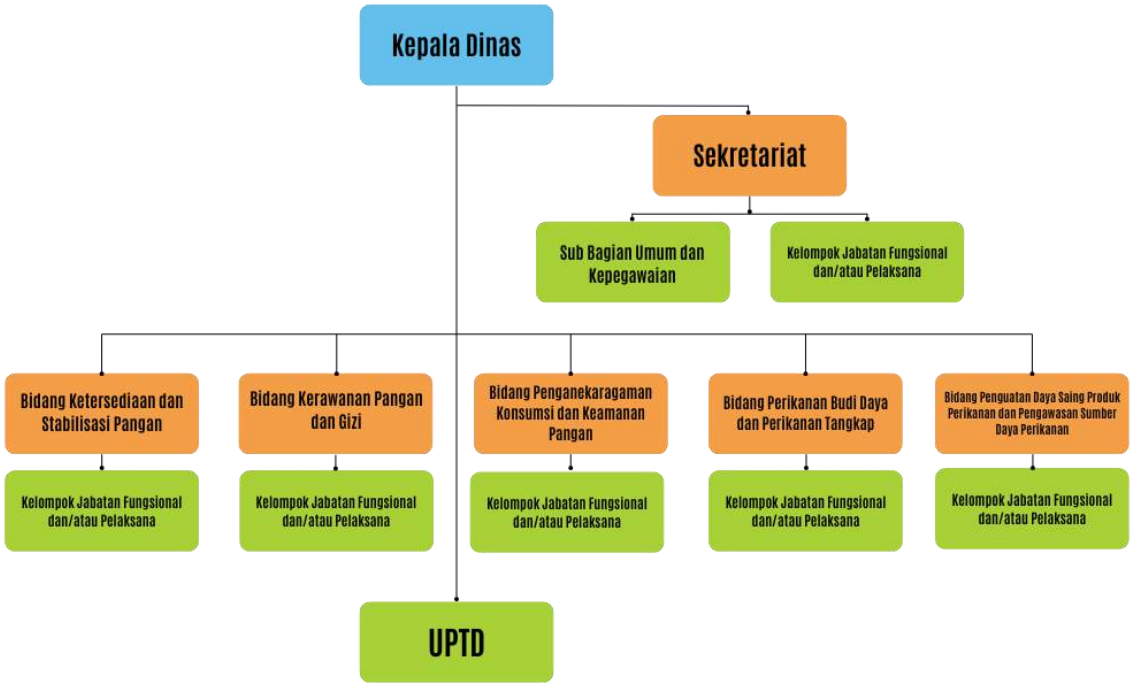

1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam ra/ngka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum adanya regulasi ketahanan pangan daerah;
2. Maraknya pemakaian bahan berbahaya pada bahan pangan segar;
3. Masih adanya daerah rawan pangan di Kabupaten Agam;
4. Layanan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) belum merata;
5. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga;
6. Rendahnya skor pola pangan harapan masyarakat;
7. Belum sinergisnya pengembangan wisata dengan sektor pangan;
8. Produk pangan yang dihasilkan kurang memiliki nilai tambah;
9. Menurunya produksi perikanan;
10. Menurunnya daya dukung perairan dan lingkungannya;
11. Produk perikanan yang dihasilkan kurang memiliki nilai tambah;
12. Pemahaman masyarakat tentang mutu produk perikanan masih rendah;
13. Belum terkonsentrasinya usaha perikanan dalam satu kawasan;
14. Masih terbatasnya pengetahuan tentang diversifikasi olahan;
15. Belum sinergisnya pengembangan wisata dengan sektor perikanan;
16. Rendahnya kemandirian usaha masyarakat;
17. Jaminan untuk mendapatkan permodalan terbatas;
18. Sapras UMKM belum memenuhi standar UPI zero waste.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan paragraf di atas.

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021;

1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Agam nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Agam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kabupaten Agam yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Agam dengan

Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 adalah:

> **"Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera , Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani"**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Menghadirkan tata kelola Pemerintah yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.
2. Membangun perekonomian masyrakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.
4. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.

5. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengacu pada Misi ke-2 dan Misi ke-4 yaitu :

Misi ke-2 **"Membangun perekonomian masyrakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata"**
Misi ke-4 **"Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter"**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah			Indeks ketahanan pangan daerah	86	88	90	92	94	96
		1.1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	100	100	100	100	100	100
		1.2	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	100	100	100	100	100
		1.3	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	81	82	83	84	85	86
2	Meningkatnya produksi usaha perikanan			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,68	4,71	4,75	4,80	4,86	4,90
		2.1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,23	0,25	0,25	0,25	0,12	0,12
		2.2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	7	9	0,83	0,82	0,82	0,82
		2.3	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,41	1,53	1,23	1,36	1,34	1,32
3	Meningkatnya Nilai RB berdasarkan PMPRB	3.1	Meningkatnya tata kelola OPD	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	75	75	76	76,5	77	77,5

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA
A.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	%	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan	Badan Pangan Nasional
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	%	Jumlah produksi beras bagi jumlah penduduk kali seratus persen	KSP
2.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	%	Jumlah penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan bagi jumlah penanganan kerawanan pangan yang direncanakan kali seratus persen	KPG
3.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	Persen AKG kali bobot masing-masing kelompok pangan	PKKP
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	Jumlah PDRB yang berasal dari sektor perikanan dalam bentuk persentase (%). (data laju ADHK statistik)	BPS
4.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	Produksi tangkap (n) – produksi tangkap tahun (n-1)/ produksi tangkap tahun (n-1) *100% n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya	PBPT
5.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	Produksi budidaya (n) – produksi budidaya tahun (n-1)/ produksi budidaya tahun (n-1) *100% n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya	PBPT

6.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	%	Produksi olahan perikanan tahu(n) – produksi olahan perikanan tahun (n-1)/ produksi olahan perikanan tahun (n-1) *100% n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya	PDSPSP
C	Meningkatnya Nilai RB berdasarkan PMPRB	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	Nilai	LHE Inspektorat	Inspektorat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	Nilai	76
2	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	%	100
3	Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	%	100
4	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	83
5	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perkanan tangkap	%	0,25
6	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perkanan budidaya	%	0,83
7	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perkanan	%	1,23

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tahun 2023

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	85%	3.498.293.709,-
2	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Peningkatan jumlah nagari mandiri pangan (nagari)	1	63.847.000,-
3	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	112	679.390.625,-
4	Penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan nagari rawan pangan	14,50	137.137.110,-
5	Pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar (%)	35	64.954.810,-
6	Pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	8.140	369.810.150,-
7	Pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	30.250	638.105.000,-
8	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB pada tahun berjalann (%)	20	300.000.000,-
9	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan (orang)	318	655.572.385,-
Total				**6.407.110.789,-**

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan dokumen pelaksanaan anggaran dipilih point 1 s.d point 3 dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	Nilai	76
2	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	%	100
3	Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	%	100
4	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	83
5	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perkanan tangkap	%	0,25
6	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perkanan budidaya	%	0,83
7	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perkanan	%	1,23

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	85%	3.523.349.431,-
2	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Peningkatan jumlah nagari mandiri pangan (nagari)	1	46.547.000,-
3	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	112	653.925.925,-
4	Penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan nagari rawan pangan	14,50	104.730.910,-
5	Pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar (%)	35	63.414.563,-
6	Pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	8.140	359.060.150,-
7	Pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	30.250	736.290.000,-
8	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB pada tahun berjalann (%)	20	42.331.700,-
9	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan (orang)	318	525.598.735,-
Total				**6.055.248.414**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut.

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	120 ≥ X >100
2	Baik	X =100
3	Cukup	80< X <100
4	Kurang	50≤X ≤80
5	Sangat Kurang	X <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
A	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	90	86,40	96	Badan Pangan Nasional
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	100	304	304	KSP
2	Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	100	100	KPG
3	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	83	86,6	104,33	PKKP
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDBR	4,75	*	*	BPS
4	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,25	0,024	9,6	PBPT
5	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,83	-33,82	-4074,69	PBPT

6	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,23	-4,14	-336,58	PDSPSP
C	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	76	**	**	Inspektorat

*menunggu rilis dari Badan Pangan Nasional dan BPS
**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai RB diganti dengan Nilai SAKIP)

Uraian penjelasan tabel :

1. **Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKPD)** adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Indeks ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketahanan Pangan bersifat multidimensi sehingga penilaian terhadap situasi pangan melibatkan serangkaian indikator. Indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional.

   Capaian Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 sebesar 86.4, meskipun berada dibawah target sebesar 90 namun berada dalam kondisi sangat tahan pangan.

   Berdasarkan Cut-off Point Indeks Ketahanan Pangan Daerah berikut :

Kelompok IKP Daerah	Kabupaten	Kota
1 (Sangat Rentan)	<= 41,52	<= 28,84
2	> 41.52 – 51,42	> 28,84 – 41,44
3	> 51.52 – 59,58	> 41,44 – 51,29
4	> 59.58 – 67,75	> 51,29 – 61,13
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64
6 (Sangat Tahan)	> 75,68	> 70,64

   Angka realisasi 86,40 menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang **sangat baik**. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok IKP Daerah 1 adalah Kabupaten/Kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi daripada Kabupaten/Kota dengan kelompok diatasnya. Sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. **Kabupaten Agam berada pada Kelompok IKP Daerah 6 yang artinya berada pada kondisi ketahanan pangan yang sangat baik (Zona hijau).**

2. **Ketersediaan pangan utama** merujuk pada jumlah pangan yang tersedia secara fisik di suatu wilayah. Pangan ini dapat diperoleh melalui hasil produksi domestik, impor, perdagangan, atau bantuan pangan. Dalam hal ini, komoditas yang menjadi data adalah komoditas beras yang menjadi bahan pokok utama masyarakat. Produksi beras pada tahun 2023 sebanyak 206.562 ton sedangkan kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Agam tahun 2023 sebanyak 67.949 ton sehingga persentase ketersediaan pangan utama sebesar 304%. Produksi beras yang surplus disebabkan Kabupaten Agam yang merupakan daerah penghasil beras dan mampu mensuplai beras yang surplus ke provinsi tetangga.

3. **Persentase penanganan kerawanan pangan daerah** merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengintervensi nagari yang tergolong rawan pangan berdasarkan hasil analisa dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022 sehingga penanganannya dilakukan pada tahun 2023. Dari peta tersebut, diketahui ada 3 nagari yang perlu diintervensi yaitu Nagari Malalak Selatan dan Nagari Malalak Timur (Kecamatan Malalak) serta Nagari Kampung Tangah (Kecamatan Lubuk Basung). Kegiatan yang dilakukan adalah :

    a. Pembuatan regulasi SK Bupati Agam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Lokasi Pelaksana Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan
    b. Sosialisasi Kegiatan Ketahanan Pangan dan kegiatan Nagari Mandiri Pangan
    c. Pendataan calon penerima manfaat kegiatan nagari mandiri pangan
    d. Pembentukan kelompok afinitas (Lambah Singgalang, Puan Mandiri, Sini Air Maju Bersama dan Maju Jaya)
    e. Pelaksanaan intervensi dengan penyaluran bantuan pengembangan usaha produktif kepada kelompok afinitas.

4. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH menjadi indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam suatu daerah, semakin tinggi skor PPH (maksimal 100) maka

semakin beragam pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Skor PPH diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh BPS kemudian diolah menggunakan Aplikasi Harmonisasi PPH Data Susenas. Peningkatan Skor PPH disebabkan karena sudah banyaknya kelompok yang melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestasi (P2L), semakin banyaknya masyarakat yang sudah mengkonsumsi buah dan sayur dan menurunnya konsumsi beras serta makin intensifnya pembinaan kepada kelompok - kelompok dan masyarakat.

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH
1.	Padi-padian	25
2.	Umbi-umbian	1
3.	Pangan hewani	23.7
4.	Minyak dan lemak	5
5.	Buah/biji berminyak	1
6.	Kacang-kacangan	4.9
7.	Gula	1.6
8.	Sayur dan buah	24.3
9.	Lain-lain	0.1
Total		**86.6**

Sumber : Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan

5. **Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB** (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perikanan terhadap total nilai ekonomi di suatu wilayah. Nilai tambah ini dihitung dengan mengurangi nilai input (seperti biaya produksi, bahan baku, dan tenaga kerja) dari nilai output (seperti hasil penjualan ikan dan produk perikanan lainnya). Semakin tinggi kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB maka semakin penting peran sektor perikanan terhadap perekonomian suatu daerah. Data kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2023 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

6. **Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap** adalah peningkatan kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya yang hidup di perairan umum dan perairan laut, baik di laut, sungai, danau, maupun waduk. Perikanan tangkap dapat dilakukan secara tradisional maupun modern dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap dan armada penangkapan. Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari target 0,25% menjadi 0.024%. Penurunan ini dikarenakan kondisi perubahan cuaca yang ekstrim terutama pada triwulan III dan IV dan belum adanya dermaga atau kolam pelabuhan tempat berlindungnya armada nelayan sehingga mengurangi aktivitas nelayan melaut.

7. **Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya** adalah peningkatan kegiatan usaha membudidayakan ikan, udang, dan/atau hewan air lainnya, baik di air tawar maupun air payau, dengan cara melakukan campur tangan dalam proses pertumbuhannya, meliputi pemberian pakan, pengaturan kualitas air, dan/atau perlindungan terhadap hama dan penyakit. Pada tahun 2023 produksi perikanan budidaya menurun secara drastis dari target 0.83% menjadi -33.82% yang disebabkan penurunan aktivitas budidaya ikan secara signifikan di KJA (Keramba Jaring Apung) Danau Maninjau akibat kondisi cuaca yang ekstrim sejak triwulan IV Tahun 2022 dan masih berlangsung sepanjang Tahun 2023, serta terbatasnya daya dukung perairan danau terhadap padat tebar dan kelangsungan hidup (Survival Rate/SR) populasi ikan budidaya di KJA Danau Maninjau, sehingga mengakibatkan turunnya produksi budidaya di Danau Maninjau.

8. **Persentase peningkatan produksi olahan perikanan adalah** peningkatan kegiatan mengubah hasil perikanan segar menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah dan daya tahan lebih lama. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi olahan perikanan dari target 1,23% menjadi -4,14% yang disebabkan karena supplay bahan baku kurang tersedia karena kematian ikan disebabkan cuaca ekstrim pada triwulan II dan III sehingga keberlanjutan pasokan bahan baku tidak terjamin bagi pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan.

9. **Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB** adalah Nilai RB (Reformasi Birokrasi) perangkat daerah berdasarkan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi) adalah skor yang diperoleh perangkat daerah setelah melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan delapan area perubahan yang ditetapkan dalam PMPRB. Pada perkembangannya, Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB tidak lagi dijadikan IKU/Perjanjian Kinerja dan digantikan dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
A	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	88	85,34	96,97	90	86.4	96%
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	100	100	100	100	304	304
2	Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	82	85,6	104,39	83	86,6	104,33
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,71	2,21	46,92	4,75	*	*
4	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perkanan tangkap	0,25	1,26	504	0,25	0,024	9,6
5	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perkanan budidaya	9	25,14	279,33	0,83	-33,82	-4074,69

6	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perkanan	1,53	2	130,71	1,23	-4,14	-336,58
C	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	75	69.6	92.8	76	**	**

*menunggu rilis dari Badan Pangan Nasional dan BPS
**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai RB diganti dengan Nilai SAKIP)

Uraian penjelasan tabel :

1. **Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKPD)** tahun 2023 sebesar 86.4 lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 85.34. Peningkatan didorong oleh faktor ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang lebih baik. Penilaian terhadap Indeks Ketahanan Pangan Daerah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan Badan Pangan Nasional.
2. **Persentase ketersediaan pangan utama** tahun 2023 sebesar 304% dibanding tahun 2022 sebesar 100%. Peningkatan didorong oleh produksi beras Kabupaten Agam yang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
3. **Persentase penanganan kerawanan pangan daerah** tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% dengan kegiatan intervensi terhadap daerah rawan pangan hasil analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan.
4. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** tahun 2023 sebesar 86.6 lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 85.6. Peningkatan didorong oleh peningkatan konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Faktor lainnya adalah distribusi dan keterjangkauan pangan sehingga masyarakat dapat mengakses jenis pangan secara lebih baik.**Data kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB** tahun 2023 belum dapat diperbanding dengan tahun 2022 karena belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.
5. **Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap** pada tahun 2023 sebesar 0.024% mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 1.26%. Penurunan ini dikarenakan kondisi perubahan cuaca yang ekstrim terutama pada triwulan III dan IV dan belum adanya dermaga atau kolam

pelabuhan tempat berlindungnya armada nelayan sehingga mengurangi aktivitas nelayan melaut.

6. **Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya** pada tahun 2023 sebesar -33.82% mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 25.14%. Penurunan produksi secara drastis dikarenakan penurunan aktivitas budidaya ikan secara signifikan di KJA Danau Maninjau akibat kondisi cuaca yang ekstrim sejak triwulan IV Tahun 2022 dan masih berlangsung sepanjang Tahun 2023, serta terbatasnya daya dukung perairan danau terhadap padat tebar dan kelangsungan hidup (Survival Rate/SR) populasi ikan budidaya di KJA Danau Maninjau, sehingga mengakibatkan turunnya produksi budidaya di Danau Maninjau.
7. **Persentase peningkatan produksi olahan perikanan** pada tahun 2023 sebesar -4.14% mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 2%. Produksi olahan perikanan mengalami penurunan disebabkan pengaruh ketersediaan bahan baku produksi perikanan budidaya dan tangkap karena kematian ikan yang disebabkan cuaca ekstrim pada triwulan II dan III sehingga kontinuitas supplay bahan baku tidak terjamin.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
A.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	85,34	86,40	96	90
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	100	304	100	304
2.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	100	100	100

3.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	85,6	86,6	86	100.7
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	2,21	*	4,90	*
4.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,26	0,024	0,12	20
5.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	25,14	-33.82	0,82	-4124,39
6.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	2	-4.14	1,32	-313,63
C	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	69.6	**	77.5	**

*menunggu rilis dari Badan Pangan Nasional dan BPS
**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai RB diganti dengan Nilai SAKIP)

Perbandingan capaian kinerja berdasarkan target Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dengan Standar Nasional disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Standar dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
A.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	86.4	68.4	126.31%
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	304	-	-
2.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	-	-
3.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	86,6	94	92.13%
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	*	-	-
4.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,25	-	-
5.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,83	-	-
6.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,23	-	-
C	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	**	-	-

*menunggu rilis dari Badan Pangan Nasional dan BPS
**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai RB diganti dengan Nilai SAKIP)

1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 mencapai 86.4, lebih tinggi dari Standar Nasional Indeks Ketahanan Pangan Indonesia/Global Food Security Index yaitu 68.4. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap tingginya IKPD:
    a. **Ketersediaan pangan yang memadai**: Kabupaten Agam memiliki potensi sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.
    b. **Akses terhadap pangan yang baik**: Masyarakat Kabupaten Agam memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap pangan yang bergizi dan seimbang.
    c. **Pemanfaatan pangan yang optimal**: Masyarakat Kabupaten Agam memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik tentang pentingnya konsumsi pangan yang bergizi dan seimbang.
    d. **Stabilitas pangan yang terjaga**: Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan

2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Agam Tahun 2023 mencapai 86.6, lebih rendah dari Standar Nasional Skor Pola Pangan Harapan yaitu 94. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya skor PPH yaitu :
    a. Pola konsumsi masyarakat Kabupaten Agam terhadap kelompok pangan padi-padian masih melebihi jumlah ideal pada pola pangan harapan. Jumlah kalori sebesar 1.175 kkal/kap/hari melebihi jumlah ideal sebesar 1.050 kkal/kap/hari. sedangkan kontribusi umbi-umbian masih sangat rendah dari standar ideal.
    b. Pola konsumsi pada pangan lauk pauk masih rendah pada kelompok pangan kacang-kacangan. Jumlah kalori konsumsi pada pangan kacang-kacangan sebesar 51.9 kkal/kap/hari, sangat rendah dari jumlah ideal sebesar 105 kkal/kap/hari.
    c. Pola konsumsi pada pangan sayur dan buah masih dibawah standar ideal yang dianjurkan pada pola pangan harapan. Jumlah kalori konsumsi pada

pangan sayur dan buah sebesar 102.3 kkal/kap/hari, sangat rendah dari jumlah ideal sebesar 126 kkal/kap/hari.

d. Pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh karakteristik pangan, karakteristik individu, lingkungan, agama, sosial budaya, ekonomi, distribusi pangan dan ketersediaan pangan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
A.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	90	86.4	96%	Penetapan target yang tidak realistis (terlalu tinggi). Realisasi 86.4 sudah tergolong sangat tahan pangan	Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan Daerah
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	100	304	304	Kabupaten Agam merupakan sentra pertanian sehingga produksi beras surplus dibanding kebutuhan	Koordinasi bersama Dinas Pertanian
2.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	100	100	Penanganan kerawanan pangan pada daerah rawan pangan berdasarkan analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan	Memfasilitasi pendanaan dalam menangani daerah rawan pangan dan melalukan sosialisasi kepada lintas sektoral
3.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	83	86,6	104,33	Meningkatnya pemahaman masyakarat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Melakukan pembinaan, sosialisasi dan promosi agar merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan B2SA
B	Meningkatnya	Kontribusi sektor	4,75	*	*	Data belum tersedia	Berupaya

	produksi usaha perikanan	perikanan terhadap PDRB					meningkatkan produktivitas usaha perikanan
4.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,25	0,024	9,6	Kondisi perubahan cuaca yang ekstrim dan belum adanya dermaga/kolam pelabuhan tempat berlindungnya armada nelayan	Meningkatkan sarana penangkapan ikan (mesin, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan) melalui bantuan dari pemerintah kabupaten agam dan provinsi
5.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,83	-33,82	-4074,69	Kondisi perubahan cuaca yang ekstrim serta terbatasnya daya dukung perairan danau terhadap budidaya di KJA Danau Maninjau	Mendukung masyarakat dalam melakukan pembudidayaan ikan di daratan
6.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,23	-4,14	-336,58	Suplay bahan baku kurang tersedia karena kematian masal ikan disebabkan karena cuaca yang esktrim	Meningkatkan suplay bahan baku dan aktivitas penanganan ikan segar atau dingin untuk kebutuhan pedagang keliling
C	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	76	**	**	Data belum tersedia	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah

*menunggu rilis dari Badan Pangan Nasional dan BPS
**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai RB diganti dengan Nilai SAKIP)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
A	Indeks ketahanan pangan daerah	90	86.4	96				
1	Persentase ketersediaan pangan daerah	100	304	304	46.547.000,-	41.852.900,-	89,91	**Efisien**
2	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	100	100	104.730.910,-	101.540.600,-	96,95	**Efisien**
3	Skor pola pangan harapan (PPH)	83	86,6	104,33	717.340.488,-	667.791.529,-	93,09	**Efisien**
B	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,75	*	*				
4	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,25	0,024	9,6	359.060.150,-	348.921.770,-	97,17	**Tidak Efisien**
5	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,83	-33,82	-4074,69	736.290.000,-	677.873.840,-	92,06	**Tidak Efisien**
6	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,23	-4,32	-336,58	567.930.435,-	497.981.686,-	87,68	**Tidak Efisien**
C	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	76	**	**	3.523.349.431,-	3.355.482.085,-	95,23	**Capaian belum tersedia**

Mengukur tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran biaya dengan realisasi capaian kinerja dikalikan dengan seratus persen (100%). Kemudian menganalisanya berdasarkan kriteria efisiensi berikut :

a. x < 100% = Efisien

b. x= 100% = Efisien seimbang

c. x> 100% = Tidak Efisien

Dari tabel diatas dapat dijelaskan :

1. Serapan anggaran yang mendukung indikator Persentase Ketersediaan Pangan Daerah adalah 89,91%, kegiatan tersebut mencapai realisasi 304% dari target 100% sehingga disimpulkan **Efisien.**
2. Serapan anggaran yang mendukung indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Daerah adalah 96,95%, kegiatan tersebut mencapai realisasi 100% dari target 100% sehingga disimpulkan **Efisien.**
3. Serapan anggaran yang mendukung indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah 93,09%, kegiatan tersebut mencapai realisasi 104,33% dari target sehingga disimpulkan **Efisien.**
4. Serapan anggaran yang mendukung indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap adalah 97,17%, kegiatan tersebut mencapai realisasi 9,6% dari target sehingga disimpulkan **Tidak Efisien.**
5. Serapan anggaran yang mendukung indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah 92,06%, realisasi kinerja -4074,69% dari target sehingga disimpulkan **Tidak Efisien.**
6. Serapan anggaran yang mendukung indikator Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan adalah 87,68%, realisasi kinerja -336,58% dari target sehingga disimpulkan **Tidak Efisien.**
7. Serapan anggaran yang mendukung indikator Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB adalah 95,23%, realisasi kinerja belum didapat menunggu LHE Inspektorat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
A.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan pangan daerah	96				
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	304	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Peningkatan jumlah nagari mandiri pangan (nagari)	100	**Menunjang**
2.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	104,33	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	109,5	**Menunjang**
				Pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar (%)	214	**Menunjang**
3.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	Penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan nagari rawan pangan	84	**Menunjang**
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	*				
4.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	9,6	Pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	99,75	**Tidak Menunjang**
5.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	-4074,69	Pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	101,36	**Tidak Menunjang**
6.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	-336.58	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB pada tahun	1010,00	**Tidak Menunjang**

					berjalann (%)		
				Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan (orang)	103,46	**Tidak Menunjang**

A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	46.547.000,-	41.852.900,-	89,91
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	46.547.000,-	41.852.900,-	89,91
2.	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	653.925.925,-	610.235.708,-	93,31
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	49.996.250,-	37.767.602,-	75,54
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	603.929.675,-	572.468.106,-	94,79%
3.	Penanganan kerawanan pangan	104.730.910,-	101.540.600,-	96,95
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	8.130.000,-	6.800.000,-	83.64
	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	96.600.910,-	94.740.600,-	98.07
4.	Pengawasan keamanan pangan	63.414.563,-	57.555.821,-	90,76
	Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	63.414.563,-	57.555.821,-	90,76
5.	Pengelolaan perikanan tangkap	359.060.150,-	348.921.770,-	97,17
	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	32.070.000,-	30.535.000,-	95,21

	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	326.990.150,-	318.386.770,-	97,36
6.	Pengelolaan perikanan budidaya	736.290.000,-	677.873.840,-	92,06
	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	30.120.000,-	27.636.000,-	91,75
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	430.000.000,-	399.260.140,-	92,85
	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	276.170.000,-	250.977.700,-	90,87
7.	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	42.331.700,-	35.357.550,-	83,52
	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	42.331.700,-	35.357.550,-	83,52
8.	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	525.598.735,-	462.624.136,-	88,01
	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	26.524.000,-	24.010.200,-	90,52
	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	32.425.910,-	27.879.756,-	85,98
	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	364.989.800,-	320.663.040,-	87,86
	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	101.659.025,-	90.071.140,-	88,60
9.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	3.523.349.431,-	3.355.482.085,-	95,23
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.599.231.935,-	2.480.981.274,-	95,45
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	46.450.000,-	37.295.000,-	80,29
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.474.800,-	4.464.400,-	99,76
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.902.078,-	56.840.800,-	99,89
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.556.000,-	16.309.750,-	98,51
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	285.118.250,-	267.380.754,-	93,77
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69.026.368,-	67.314.712,-	97,52
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	251.886.000	249.326.000,-	98,98

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	182.744.000,-	164.796.595,-	90,18
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.960.000,-	10.772.800,-	98,29

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menetapkan sebanyak 2 tujuan, 6 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Terdapat 3 indikator yang tidak mencapai sasaran yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, persentase peningkatan produksi perikanan budi daya dan persentase peningkatan produksi olahan pangan. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah			Indeks ketahanan pangan daerah	90	86.4
		1.1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	100	304
		1.2	Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	100

		1.3	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan	83	86,6
2.	Meningkatnya produksi usaha perikanan			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,75	Data belum tersedia
		2.1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,25	0,024
		2.2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,83	-33.82
		2.3	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,23	-4,14

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.055.248.414,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp.5.691.444.410,- dengan penyerapan sebesar 93.99%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2023 kepada masyarakat.

4.2 LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DILAKUKAN OLEH OPD UNTUK MENINGKATKAN KINERJA MASA MENDATANG

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup Bagi Seluruh Penduduk

   Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam daerah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Agam, meningkatkan

cadangan pangan pemerintah daerah untuk membantu menjaga ketersediaan pangan jika dalam keadaan darurat/kritis, meningkatkan peran Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan serta meningkatkan peran Lumbung Pangan Nagari.

2. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan

Strategi dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral dalam mencegah dan menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pemetaan kondisi rawan pangan dan faktor-faktor penyebabnya, mencegah kerawanan pangan melalui peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi, dan meningkatkan nagari mandiri pangan.

3. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Melalui Diversifikasi Pangan

Strategi dilakukan melalui pemanfaatan dan keamanan pangan yang difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang ditunjang dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dimana upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran.

4. Meningkatkan Produksi Perikanan

Strategi yang dilakukan dengan mengkoordinasikan upaya peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pendukung produksi perikanan tangkap dan budi daya, peningkatan kapasitas pembudidaya ikan, meningkatkan luasan

kolam melalui kegiatan cetak kolam, dan memaksimalkan fungsi Balai Benih Ikan.

5. Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan

Strategi yang dilakukan dengan mengkoordinasikan upaya peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pendukung produksi olahan perikanan serta meningkatkan jumlah konsumsi ikan masyarakat melalui sosialisasi Gemarikan, mendistribusikan produk olahan ikan kepada keluarga berisiko stunting, dan membuat pasar ikan bersih.

6. Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah

Strategi peningkatan tata kelola perangkat daerah yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan SAKIP secara akuntabel, profesional serta meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari demokrasi.

Lubuk Basung, Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN AGAM

ROSVA DESWIRA, S.Pi. M.Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19721209 200604 2 007

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN AGAM

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	76
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah (%)	100
3.	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100
4.	Meningkatnya Diversifikasi Pangan	Skor PPH (%)	83
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	0,25
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	0,83
	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan (%)	1,23

	Program Pokok		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.523.349.431	APBDP
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	46.547.000	APBDP
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	653.925.925	APBDP
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	104.730.910	APBDP
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	63.414.563	APBDP
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	359.060.150	APBDP
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	736.290.000	APBDP
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	42.331.700	APBDP
9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	525.598.735	APBDP
	Jumlah	Rp	6.055.248.414	

Lubuk Basung, November 2023

Pihak Pertama
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN

Pihak Kedua
KEPALA DINAS

ROSVA DESWIRA, S.Pi.M.Si
NIP. 19721209 200604 2 007